

RPSEP-38

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK AK-ETAP) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Kasus di Tangerang Selatan dan Bogor)

Oleh

Hendrian

Rini Dwiyani H.

Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

Abstrak

Usaha kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Peran ini semakin besar seiring dengan signifikannya pertumbuhan UMKM, baik dari segi jumlah maupun aset yang dimiliki. Sayangnya, berita baik ini tidak disertai dengan penerapan akuntansi dan pelaporan yang baik, yang sesuai dengan standar akuntansi berlaku, dalam hal ini SAK-ETAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan serta kendala penerapan SAK-ETAP pada UMKM di Wilayah Kab. Tangerang Selatan dan Bogor. Penelitian dilakukan dengan pendekatan survey yang disertai dengan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baru 4% UMKM yang telah menggunakan SAK-ETAP sebagai pedoman dalam akuntansi dan penyusunan laporan keuangan perusahaan mereka, sisanya masih sekedar melakukan pencatatan dengan lebih menekankan kepada identifikasi transaksi dan pencatatan jumlah omset. Masalah utama yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan mereka terhadap SAK-ETAP serta kompetensi staf akuntansi yang dimiliki. Sosialisasi dan bimbingan dari berbagai pihak terkait perlu lebih diintensifkan.

Kata Kunci: SAK-ETAP, UMKM, Penerapan, Masalah Penerapan.

A. PENDAHULUAN

Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia saat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan maupun masyarakat luas lainnya. Artinya, semangat dan pengembangan UMKM sudah menjadi fokus pemerintah sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pemerintah telah berupaya mendorong UMKM secara terus menerus khususnya menyediakan bantuan permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagian masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan peran dan kemampuan UMKM dalam segi bisnis selama ini ternyata memiliki andil dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat pada saat krisis ekonomi di Indonesia UMKM mampu melakukan

penyesuaian dan bertahan (*survive*) pada saat banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK dalam jumlah besar. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis, hal ini didukung oleh data seperti disajikan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)
TAHUN 2007 - 2012

No	Indikator	Tahun 2007		Tahun 2012		PERKEMBANGAN TAHUN 2007 - 2012	
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
1	Unit Usaha	49.218.030	99,99	56.534.592	99,99	7.326.929	9,8%
2	Tenaga Kerja	87.909.598	97,30	107.657.509	97,16	19.792.178	13,07%
3	PDB	1.783.423.81 4 jt	56,23	4.304.393.31 4 jt	57,94	2.682.969,5 00	94,37%

Sumber : www.depkop.go.id

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah UMKM selama 5 tahun terakhir yaitu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 9,8% dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 19,72 juta atau 13,07% dari total tenaga kerja serta peningkatan kontribusi UMKM yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) yaitu sebesar 57.94% dari total PDB.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang menggembirkan, namun pelaku bisnis pada UMKM diduga masih memiliki pemahaman yang belum memadai tentang akuntansi dan pelaporan keuangan serta urgensi penggunaannya. Mereka masih cenderung untuk mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman. Oleh karena itu dinilai perlu untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan. Kalaupun ada pencatatan yang selama ini mereka lakukan, pembukuan UMKM selama ini umumnya sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku), termasuk penerapan standar akuntansi. Padahal, laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu mereka dalam upaya pengembangan bisnis, termasuk untuk tujuan yang paling

umum diketahui, pertanggungjawaban manajemen dan untuk tujuan pemenuhan persyaratan kredit perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya. Untuk tujuan perbankan misalnya, UKM telah mempunyai laporan keuangan yang disusun berdasarkan sebuah standar yang baku dan telah berterima umum, pihak perbankan tentu akan lebih mudah untuk memberikan respon dan melakukan penilaian kelayakan bisnis UKM untuk memperoleh kredit pengembangan usaha. Untungnya, DSAK- IAI sudah menyiapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang salah satunya ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang dinamakan dengan SAK- ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang secara efektif telah diberlakukan efektif 1 Januari 2011.

Kajian tentang kelayakan penerapan SAK umum (mengacu kepada PSAK) pada UMKM dalam beberapa tahun terakhir telah mengarahkan kepada suatu kondisi yang disebut dengan standar *overload*. Maksudnya, PSAK terlalu berat untuk diterapkan pada UMKM, termasuk koperasi. Oleh karena itu pemberlakuan PSAK-ETAP dapat dinilai sebagai sebuah terobosan dan langkah maju dalam pengembangan penerapan akuntansi sampai pada level usaha mikro, kecil dan menengah. SAK-ETAP ini adalah suatu prinsip, prosedur, metode atau aturan penyusunan laporan keuangan pada Entitas Tanpa Akuntansi Publik (ETAP) yaitu entitas usaha yang tidak (belum) tercatat di pasar modal atau tidak dalam proses pengajuan di pasar modal dan entitas ini bukan lembaga keuangan. Salah satu entitas usaha yang dimaksud dalam standar tersebut adalah usaha ekonomi berskala kecil dan menengah (UKM.).

Vasek (2010) menjelaskan tentang Perkembangan IFRS untuk UKM sebagai alternatif dari penerapan *full IFRS*. *International Accounting Standards Board* (IASB) mulai menyadari kompleksitas dari penerapan *full IFRS* untuk perusahaan jasa. Pada Juni 2004, ketika *exposure draft* IFRS untuk usaha kecil dan menengah (IFRS for SMEs), proyek lima tahunpun dimulai. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketentuan dan persyaratan yang dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda dari para pengguna informasi dari UKM tersebut dan mengarahkan pada keseimbangan antara biaya dan manfaat (*cost versus benefit*) yang berhubungan dengan pengadopsian IFRS.

Dukungan terhadap proyek ini telah diperlihatkan dengan adanya perluasan adopsi IFRS secara terus menerus di dunia. Semakin banyak negara yang memerlukan atau mengizinkan untuk menggunakan IFRS ketika perusahaan menyusun laporan keuangan

terpisah atau konsolidasi. Fakta ini tidak hanya menyangkut perusahaan publik tetapi juga menyangkut usaha kecil dan menengah.

Sementara di Indonesia, latar belakang diperlukannya SAK-ETAP karena Standar Akuntansi Keuangan yang mengadopsi IFRS terlalu kompleks untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah di Indonesia. Kompleksitas ini akan mengakibatkan *cost of compliance* yang lebih besar pula seperti dikemukakan oleh Eierle dan Haller (2010). Tujuan penyusunan SAK-ETAP tidak hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang belum *go public*, tetapi juga membantu melatih perusahaan sejak dini agar lebih matang dalam mempersiapkan laporan keuangan kedepannya ketika *go public*. Pada mulanya sempat tercetus ide agar SAK-ETAP mengikuti "IFRS for SME's" (*Small Medium Entities*). Namun setelah dikaji lebih mendalam IFRS for SME's tersebut ternyata tidak sederhana untuk ukuran perusahaan kecil menengah di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan- Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) mengembangkan standar yang dianggap lebih cocok dengan kondisi di Indonesia yang kemudian disebut dengan SAK-ETAP. Ada beberapa pihak yang juga memberikan pendapat bahwa penamaan usaha kecil dan menengah dapat mengundang perdebatan karena terdapatnya beragam definisi dan kriteria suatu usaha dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil atau menengah.

SAK-ETAP adalah salah satu dari tiga pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia bersama dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan PSAS (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah). Beberapa karakteristik SAK-ETAP adalah ia adalah *stand alone standard* maksudnya tidak tergantung kepada PSAK, hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah, mayoritas menggunakan konsep kos historis, pengaturan yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK dan tidak akan berubah dalam beberapa tahun. Beberapa karakteristik ini, seharusnya, jika diterapkan dengan baik memberikan harapan baik terhadap penerapan akuntansi pada level UMKM.

Meskipun SAK-ETAP telah diterapkan sejak 3 tahun yang lalu, tetapi sepertinya perkembangan penerapan SAK-ETAP pada UMKM masih belum menggembirakan. Belum banyak UMKM yang telah menerapkannya dan dari yang sedikit tersebut sebagian besar belum menerapkannya sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam SAK-

ETAP. Selain itu mungkin perlu didukung oleh regulasi yang dapat mendorong (*triggering*) seperti yang telah diterapkan pada koperasi. Sebagai perbandingan, koperasi yang sebelumnya mengacu kepada PSAK nomor 27 telah diminta untuk meninggalkan penggunaan PSAK tersebut melalui PPSAK (Pencabutan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan) nomor 8 tahun 2010. Sejak 1 Januari 2012 Standar Akuntansi Keuangan koperasi menggunakan kebijakan akuntansi yang baru dan sebagai langkah transisional disahkan dengan Surat Edaran Deputy Bidang Kelembagaan KUKM No. 200/SE/Dep.I/XII/2012. Sejak Desember 2011 disampaikan ke seluruh dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM provinsi, tentang pencabutan PSAK No. 27 dan penggunaan SAK ETAP (Setyo, 2012). Hal ini juga kemudian dipekuat dengan Permen KUKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Koperasi Indonesia. Oleh karena itu, pengidentifikasian kembali permasalahan-permasalahan terkait dengan masih lemahnya penerapan SAK ETAP perlu untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana pengaruh penerapan SAK-ETAP bagi dunia bisnis UMKM dalam penyusunan Laporan Keuangan
2. Bagaimana pengaruh penerapan SAK ETAP bagi dunia bisnis UMKM
3. Kendala dan hambatan apa sajakah yang dialami oleh UKM dalam dalam penerapan dan pengimplementasian SAK dan SAK ETAP?

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi, menelaah dan sekaligus mengevaluasi tentang Penerapan SAK ETAP bagi dunia bisnis UMKM dalam penyusunan Laporan Keuangan telah berpengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan UMKM, Penerapan Prinsip-prinsip SAK ETAP bagi dunia bisnis UMKM dalam pengaruhnya terhadap kinerja UKM dan kendala atau hambatan apa yang dialami oleh UKM dalam dalam penerapan dan pengimplementasian SAK dan SAK ETAP

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi Pemerintah diharapkan bermanfaat dalam mengukur kinerja keuangan UKM, khususnya implementasi SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan UKM. Untuk UKM itu sendiri untuk dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis dengan memahami dan

mengimplemantasikan SAK ETAP serta bagi peneliti berikutnya yang memiliki *research interest* tentang penerapan SAK ETAP pada UKM.

B. Tinjauan Literatur

B.1 Definisi dan Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UKM memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: (1) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah, (2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah, (3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha, (4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, (5) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha, (6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal dan (7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Tambunan (2009) juga memberikan gambaran tentang karakteristik UKM seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Karakteristik-karakteristik Utama Entitas Bisnis Kecil

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Formalitas	Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/jarang bayar pajak	Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak	Semua di sektor formal; terdaftar dan bayar pajak
2	Organisasi dan Manajemen	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen dan struktur organisasi formal (MOF), sistem pembukuan formal (ACS)	Dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD, MOF, ACS	Banyak yang mempekerjakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF, ACS
3	Sifat dari Kesempatan Kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga yang tidak dibayar	Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji	Semua memakai TK yang digaji; semua memiliki sistem perekrutan formal
4	Pola/sifat dari Proses Produksi	Derajat mekanisme sangat rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah	Beberapa memakai mesin-mesin terbaru	Banyak punya derajat mekanisasi yang tinggi/punya akses terhadap teknologi tinggi
5	Orientasi Pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas
6	Profil Ekonomi dan Sosial dari Pemilik Usaha	Pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin; motivasi utama: <i>survival</i>	Banyak berpendidikan baik dan dari RT nonmiskin; banyak	Sebagian besar berpendidikan baik dan dari RT makmur; motivasi

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
			yang bermotivasi bisnis/mencari profit	utama: profit
7	Sumber-sumber dari Bahan Baku dan Modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal	Banyak yang memakai bahan baku impor dan punya akses kredit formal
8	Hubungan-hubungan Eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar (UB)	Banyak yang punya akses ke program-program pemerintah dan punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA)	Sebagian besar punya akses ke program-program pemerintah dan banyak yang punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA)
9	Wanita Pengusaha	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat rendah.

Sumber: Tambunan, 2009

B.2 Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan.

Menurut *J. Fred Weston & Thomas E. Copeland* (dalam Sawir, 2001), “Laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu”. Menurut Kieso, (2007:2) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang di kuantifikasi dalam nilai moneter.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi

tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP 2009:2

B.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas dinyatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

B.4 Dampak Penerapan SAK ETAP Bagi UKM

Tabel 3 berikut ini menyajikan dampak positif yang akan diperoleh jika pelaku usaha menyadari pentingnya akuntansi dan pelaporan keuangan untuk mendukung perencanaan dan operasi perusahaannya.

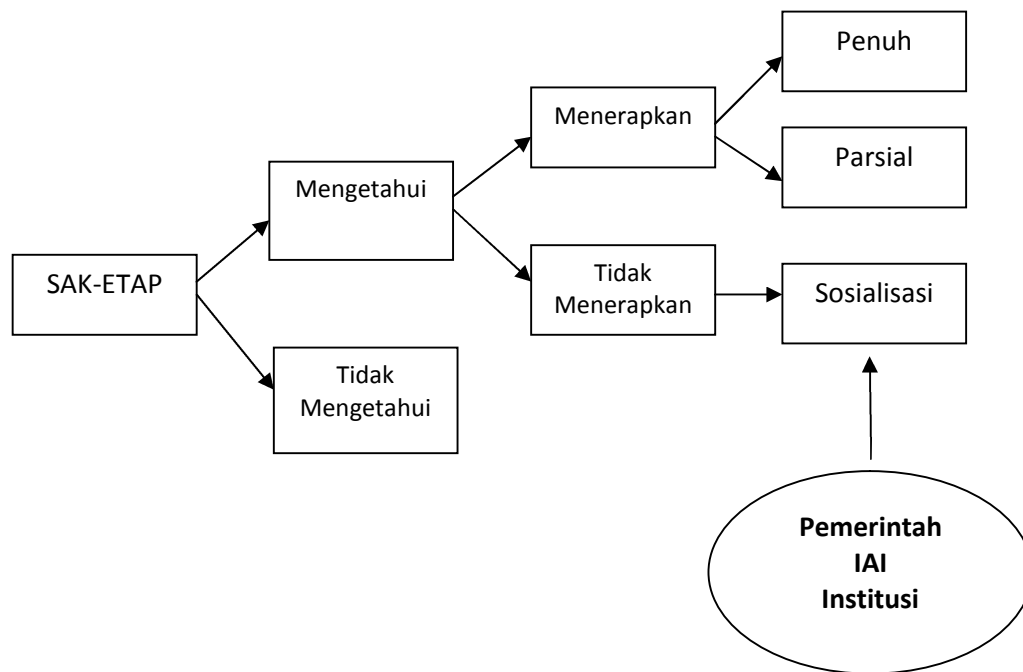
Tabel 3
Dampak Penerapan SAK ETAP

Laporan Keuangan	Aktivitas Manajemen	Hubungan dengan pihak ke 3 (bank)	Perguruan tinggi & pihak terkait
TAAT yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Tertib • Akurat • Akuntabel • Terbuka/transparan 	<ul style="list-style-type: none"> • pengambilan keputusan • ekspansi usaha • peningkatan dalam efisiensi, efektivitas dan produktivitas usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • akses kredit dan modal • bankable • pendekatan yang sistematis dlm pendanaan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • bentuk tridarma PT • implementasi teori (praktis) • peningkatan kualitas mahasiswa (civitas akademik. PT) • lapangan kerja baru (selaku konsultan/trainer)
Penguatan salah satu dari 3 pilar standar (PSAK, ETAP dan SAK Syariah).	Peningkatan profesionalitas SDM dan usaha	Sinergitas antar entitas dan investor	Mendukung program pemerintah

B.5 Alur Pemikiran Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi beberapa hal penting tentang penerapan SAK-ETAP pada usaha kecil dan menengah. Poin-poin penting tersebut antara lain mengidentifikasi penerapan akuntansi pada UKM atau *existing condition* kemudian menjelaskan bagaimana bentuk penerapan SAK-ETAP pada UKM-UKM tersebut. Alur pikir dari penelitian ini digambarkan dengan gambar 1 berikut ini.

Gambar 1
Alur Pemikiran Penelitian



C. METODE PENELITIAN

C.1 Desain Penelitian

Arah penelitian yang akan dilakukan, penelitian tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni ditinjau dari tujuan penelitian merupakan penelitian terapan, dimana dalam penelitian tersebut diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. (Sugiyono, 1999:5). Ditinjau dari metode penelitiannya merupakan penelitian dengan metode kuantitatif (*naturalistic*) yang disertai dengan tambahan informasi kualitatif di lapangan.

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah organisasional. Artinya, penelitian ini menggunakan organisasi sebagai subyek untuk menyimpulkan proses identifikasi, telaah dan evaluasi. Dengan kata lain, penelitian ini bukan menggunakan unit analisis secara individual yang artinya pendapat individu sebagai subyek untuk menyimpulkan analisis. Adapun, domain subyek penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- Penerapan akuntansi adalah pemanfaatan ketrampilan dan pengetahuan dalam mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian

yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

- Laporan keuangan UKM adalah pembukuan sederhana yang dibuat oleh pengelola UKM untuk mengukur kinerja bisnis, apakah bisnis anda menguntungkan atau justru merugikan.
- Laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK ETAP, dan laporan keuangan ini diharapkan dapat mempermudah UKM dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penerapan SAK-ETAP pada UKM serta permasalahan yang mereka dihadapi. Data diperoleh melalui survey dengan menggunakan kuesioner yang disertai dengan observasi dan wawancara langsung yang dilakukan kepada responden (sebagai wakil organisasi bisnis), yang sesuai dengan apa yang terjadi dan dialami oleh responden.

C.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. **Kuesioner** dengan memberikan kuesioner kepada responden
2. **Wawancara** dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.
3. **Observasi** merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.” (Sugiyono, 1999, 130-134).
4. **Inspeksi langsung** pada responden, untuk mengetahui proses bisnis yang berkaitan dengan usaha responden.

Beberapa poin penting yang ingin diidentifikasi adalah seperti digambarkan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Indikator Penerapan SAK-ETAP

No	Indikator
1	pencatatan asset telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
2	pencatatan utang telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
3	modal telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
4	laporan realisasi anggaran telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan
5	pengelolaan keuangan telah ada pemisahan tugas fungsi dan tanggungjawab
6	pengelola keuangan telah memahami penatausahaan keuangan sesuai ketentuan
7	pengelola keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi
8	sarana/prasarana didalam pengelolaan keuangan yang dimiliki telah memadai
9	informasi disajikan dengan jujur
10	informasi disajikan dengan terbuka (tidak ada yang di tutupi)
11	anggaran penerimaan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pengeluaran

C.3 Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah pada penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Tabulasi hasil wawancara, observasi, inspeksi, vouching atau tracing dokumen,
- 2) Perangkingan masalah yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan primer dan selanjutnya permasalahan-permasalahan sekunder dan seterusnya,
- 3) Mengevaluasi hasil dari pengamatan dan wawancara serta data yang didapat, kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur.
- 4) Menyimpulkan kelemahan dan menyarankan perbaikan dalam penerapan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.
- 5) Menyajikan rekomendasi kepada penyusun standar dan atau seluruh bisnis UMKM agar penerapan SAK ETAP menjadi lebih bermakna di kemudian hari.

D. HASIL PENELITIAN

D.1 Demografi Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden khususnya dalam pertanyaan terbuka untuk 25 orang responden dalam pilot proyek didapatkan informasi sebagai berikut: responden laki-laki 64% dan perempuan 36%, umur responden kurang dari 25 tahun 4%, 26 sd 30 tahun 8%, 31 sd 35 tahun 28%, dan di atas 36 tahun sebanyak 60%. Berdasarkan posisi dalam perusahaan didapatkan informasi sebagai pemilik 64%, Direktur 8%, Manajer Keuangan dan akuntansi 12%, lain-lain 12% dan tidak mengisi 4%. Pendidikan responden SMA sederajat 52%, diploma 12%, sarjana 32%, dan pasca sarjana 4%. Latar belakang pendidikan responden akuntansi 4%, manajemen 12%, ekonomi 20% dan lainnya 64%. Untuk latar belakang usaha perdagangan 44%, produksi 4%, jasa 40%, peternakan 4% dan lainnya 12%. Tahun berdiri usaha 0-5 tahun 32%, 6-10 tahun 40%, 11-15 tahun 16% dan lebih dari 16 tahun 16%.

Gambaran lainnya menjelaskan tentang aset perusahaan, jumlah karyawan, omset serta sumber pendanaan perusahaan. dari segi aset, perusahaan dengan aset kurang dari 500 juta rupiah sebanyak 52% sedangkan yang lebih dari 500 juta sebesar 44% dan tidak menjawab 4%. Karyawan yang bekerja pada unit usaha yang kurang dari 20 orang sebesar 76%, lebih dari 20 orang sebesar 16% dan sisanya tidak memberikan jawaban.

UKM dengan omset usaha selama setahun yang kurang dari 500 juta rupiah sebanyak 84% sedangkan yang lebih dari 500 juta rupiah sebesar 12% dan sisanya tidak memberikan data tentang omzet mereka. Hal penting lainnya menunjukkan, sumber pendanaan usaha sebanyak 36% dari responden menunjukkan menggunakan pendanaan pribadi dengan porsi kurang dari 50% dan sisanya sebesar 64% menggunakan pendanaan pribadi lebih dari separuh pendanaan yang dibutuhkan.

Terkait dengan pengalaman mendapatkan pendanaan dari perbankan, hasil menunjukkan bahwa hanya 48% dari unit usaha yang pernah mengajukan kredit ke bank,

sedangkan 52% belum pernah melakukannya. Diantara yang pernah mengajukan pinjaman ke Bank, 16% diantaranya pernah mendapatkan pendanaan lebih dari Rp 100.000.000.

Responden yang mempunyai staf akuntansi hanya sebesar 44%, dengan divisi khusus akuntansi hanya sebesar 40%. Laporan keuangan yang dibuat secara rutin oleh responden hanya sebesar 40%. Sedangkan untuk laporan keuangan yang berlatar belakang PSAK-ETAP hanya sebesar 12%, dengan penyusunan menggunakan program hanya sebesar 8%. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah belum adanya pemahaman, sosialisasi dan pelatihan yang responden dapatkan mengenai PSAK-ETAP. Bagi responden yang melakukan pencatatan berbasis PSAK mereka dapatkan dari pembelajaran mandiri dan mendapat informasi non formal. Padahal mereka menyadari bahwa penggunaan PSAK sangat mereka butuhkan. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi formal belum dilakukan mereka. Bagi responden pengenalan akuntansi melalui penelitian ini akan bermanfaat untuk beberapa hal diantaranya adalah untuk pencatatan asset, utang, modal, neraca, laporan laba rugi dan laporan realisasi anggaran. Begitu juga dengan fungsi informasi laporan keuangan yang ditanyakan dalam beberapa pertanyaan, secara keseluruhan hanya dipahami oleh 4% responden.

D.2 Penerapan SAK-ETAP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat responden yang memiliki asset di bawah 500 juta sebesar 52%, dan di atas 500 juta sebesar 44%. Dari informasi tersebut usaha yang dilakukan responden sudah tepat jika mereka mulai menerapkan pencatatan akuntansi yang layak. Walaupun responden yang mempunyai staf akuntansi sebanyak 44%, tapi laporan yang mereka buat masih jauh dari standar yang ada. Masih banyak dari responden hanya melakukan pencatatan yang tidak terstruktur dan manual. Informasi yang mereka dapatkan dari laporan keuangan tidak maksimal. Mereka melakukan pencatatan hanya agar tidak lupa atas transaksi yang telah dilakukan.

Berdasarkan tujuan penelitian dan data empiris dari responden didapatkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi keuangan belum sepenuhnya dilakukan, apalagi menyangkut penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK- ETAP). Hanya 4% UMKM yang telah menerapkannya dengan baik. Sehingga hasil ini belum dapat

mengungkap pengaruh penerapan SAK-ETAP terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada UMKM secara keseluruhan. Apalagi jika kita mencoba mengukur pengaruhnya terhadap kinerja UMKM.

Kendala dan hambatan yang dihadapi responden dalam penerapan SAK-ETAP ini adalah kurangnya sosialisasi yang diterima mereka. Apalagi pelatihan SAK-ETAP agar laporan keuangan yang disusun oleh UMKM berlangsung dengan baik hampir tidak pernah dilakukan. Sehingga laporan keuangan yang disusun UMKM terkesan seadanya dan tidak memberikan informasi yang cukup.

E. SIMPULAN DAN SARAN

E.1 Simpulan

Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia saat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan maupun masyarakat luas lainnya. Namun demikian dalam penerapan laporan keuangan masih banyak UMKM yang hanya melakukan pencatatan sederhana dan seadanya. Dari data lapangan yang didapat hanya 4% dari semua responden yang menggunakan standar laporan keuangan yang layak (SAK-ETAP). Sangat ironi jika kita bandingkan dengan peran penting UMKM dalam PDB yang hampir mencapai 58%. Untuk itu sangat diperlukan peran instansi terkait dalam mendukung tumbuh berkembangnya UMKM di Indonesia, salah satunya dalam hal pembuatan laporan keuangan yang berstandar.

Sebagian masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan peran dan kemampuan UMKM dalam segi bisnis yang selama ini ternyata memiliki andil dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat pada saat krisis ekonomi di Indonesia UMKM mampu melakukan penyesuaian dan bertahan (*survive*) pada saat banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK dalam jumlah besar. Tapi dalam prakteknya masih banyak permasalahan yang harus diperbaiki, khususnya dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pencatatan laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan ini menjadi perhatian utama, karena laporan keuangan menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas unit usaha yang bermanfaat pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu, serta menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen. Jika

terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pencatatan laporan keuangan di UMKM maka institusi yang berkompeten diharapkan ikut berperan untuk meningkatkan penerapan standar akuntansi ini.

E.2 Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini hanya sekedar mengidentifikasi penerapan SAK-ETAP pada UKM. penelitian ini belum menjelaskan banyak hal tentang proses adopsi dan dinamika internal perusahaan dalam menerapkan standar akuntansi ini. Kemudian, penelitian dilakukan pada lingkup wilayah yang terbatas yang mungkin tidak merepresentasi penerapan SAK-ETAP ini dengan baik. Kelemahan lainnya adalah penelitian ini tidak mampu memberikan jawaban yang *clear* untuk menjelaskan hubungan antara penerapan SAK-ETAP dengan berbagai aspek manajerial seperti perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Terkait dengan penerapan SAK-ETAP pada UKM, beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut, (1) Melakukan pendekatan mengenai permasalahan yang dihadapi UMKM dalam menghadapi bisnis, (2) Melakukan sosialisasi mengenai penataan pencatatan laporan keuangan yang berstandar agar jalannya operasional bisnis mereka menjadi lebih baik dan (3) Selanjutnya mengadakan pelatihan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (mengarah pada pelatihan SAK-ETAP)

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penerapan SAK-ETAP yang masih jauh dari harapan memerlukan campur tangan dari berbagai pihak baik dari regulator, praktisi maupun akademisi.

DAFTAR REFERENSI

- Ardi Kusumah, Arief. 2012. PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, diunduh dari journal.unsil.ac.id/download.php?id=283
- Auliyah, Iim Ma'rifatul. 2012. Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Kampung Batik Di Sidoarjo. STIE Perbanas Surabaya.

- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Per 1 Oktober, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kieso, Weygandt, Warfield, 2002. Akuntansi Intermediate, edisi kesepuluh, Jakarta: Erlangga.
- Megginson, William. L. Mary Jane Byrd, and Leon C Megginson. 2000. *Small Business Management: An Entrepreneurs Guide Book*, (3rd Ed). United States of America: McGraw Hill.
- Rudiantoro, Rizki. 2012. *Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP*. Universitas Indonesia: Makalah.
- Sarifah, Atun (2012) Analisis Persepsi SAK-ETAP Terhadap Kinerja Usaha pada UMKM Se Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*.
- Seifert, Deborah L dan Deborah L. Lindberg. 2010. Key Provision of IFRS for Small and Medium-sized Entities. *CPA Journal*.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suhardjono dan Dr. Rofi'i *Metode Penelitian Bisnis* University Adibwana Perss. Surabaya.
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Mei 2009*
- Susanto, Edi. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Di UMKM Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta* : Gigital Library Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Tambunan, T. (2009). *UMKM Di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Vasek, Libor. 2010. IFRS for SME's: A New Challenge for Worldwide Financial Reporting. *International Journal of Management Case*.